

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KAWASAN KONSERVASI PERIKANAN LUBUK LARANGAN KARAK DUSUN RANTAU PANDAN KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI

Rini Hertati^{1*}

¹*Staf Pengajar Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan,
Fakultas Perikanan, Universitas Muara Bungo-Jambi
Email: rinihertati4@gmail.com

ABSTRAK

Kawasan konservasi lubuk larangan di sepanjang aliran Sungai Batang Bungo sudah dimulai pada tahun 2013 dan sampai saat ini berjumlah sebanyak 33 lubuk dengan 1 resevat. Kawasan konservasi di Dusun Rantau Pandan terdapat dengan 3 kawasan konservasi perikanan berbasis kearifan lokal yang dikelola oleh masyarakat, pemangku adat dan pemerintah yang terkait. Sungai Batang Bungo memiliki panjang ± 50 km dan merupakan salah satu sungai utama yang ada di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dengan bentuk perairan terbuka. Penelitian dilakukan selama 2 bulan dimulai bulan Januari – februari 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat di kawasan lubuk larangan Karak Dusun Rantau Pandan terhadap keberadaan Kawasan Konservasi Perikanan lubuk larangan. Metode Penelitian adalah metode survey dan wawancara langsung, pengambilan sampel dilakukan secara acak, rumus yang digunakan adalah SWOT. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa untuk tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan kawasan konservasi dikategori rendah dengan persentase (18,71%), untuk tingkat partisipasi pemangku kepentingan dikategorikan juga rendah dengan nilai partisipasi sebesar (31,1 %).

Kata Kunci : *Kabupaten Bungo, Konservasi, Lubuk Larangan, Partisipasi Masyarakat, Rantau Pandan,*

ABSTRACT

Conservation area along the bottom of the lubuk larangan in Sungai Batang Bungo has been started in 2013 and until now consists of a total of 33 deep with one resevat. The conservation area in rantau pandan village contains 3 conservation areas for fisheries based on local wisdom which are managed by the community, customary stakeholders and the related government. The Batang Bungo River has a length of ± 50 km and is one of the main rivers in Bungo Regency, Jambi Province, with the form of open water. The study was conducted for 2 months starting from January to February 2020. The purpose of this study was to determine the level of community participation in the lubuk larangan karak area of rantau pandan Hamlet towards the existence of the Lubuk larangan fishery conservation area. The research method is a survey method and direct interviews, random sampling, the analysis used is SWOT. From the results of the study, it was found that the level of community participation in conservation area management

was categorized as low with a percentage (18.71%), for the level of stakeholder participation it was also categorized as low with a participation value of (31.1%).

Keywords : *Bungo Regency, Conservation, Lubuk Larangan, Community Participation, Rantau Pandan*

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Bungo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi yang memiliki luas perairan umum 6.907 Ha yang terdiri dari perairan Sungai, Rawa, Danau, Bendungan dan genangan air lainnya. Beberapa sungai utama yang ada di Kabupaten Bungo salah satunya adalah Sungai Batang Bungo dengan panjang \pm 50 km (Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo, 2015). Kawasan lubuk larangan yang merupakan kearifan lokal di sepanjang aliran Sungai Batang Bungo untuk saat ini berjumlah 33 lubuk, salah satunya berada di Dusun Rantau Pandan. Kecamatan Rantau Pandan memiliki luas area 239,61 km³ (5,14% dari luas wilayah Kabupaten Bungo 4.659 km²) yang terdiri dari 6 desa/kelurahan (BPS Kab. Bungo, 2011).

Saat ini, keberadaan kearifan lokal masih dinilai hanya sebagai suatu hal yang unik dan patut dilestarikan yang cenderung dijadikan sebagai obyek wisata budaya. Kearifan lokal tertentu merupakan suatu kesepakatan yang berlaku turun temurun dari suatu masyarakat tertentu yang terhimpun di dalam sebuah lembaga masyarakat adat. Berarti kearifan lokal dapat dikatakan sebagai suatu bentuk peraturan yang berlaku dan dipatuhi. Hal itu sama artinya dengan peraturan yang berlaku di

pemerintahan (Oktaviani *et al*, 2016).

Pemerintahan Kabupaten Bungo dalam pengelolaan lubuk larangan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2013. Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2013-2033. Kawasan perikanan adalah kawasan budidaya perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya perikanan, industri pengolahan hasil perikanan, dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

Pengelolaan sumberdaya ikan yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Rantau Pandan berbasiskan masyarakat. Pengelolaan sumber daya ikan yang berbasis masyarakat tidak boleh dipisahkan dari kearifan lokal masyarakat yang memanfaatkannya secara langsung. Pengelolaan perikanan berbasis masyarakat (Community Based Fisheries Management/CBFM) didefinisikan sebagai suatu proses pemberian wewenang, tanggung jawab dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumberdayanya sendiri dengan terlebih dahulu menentukan kebutuhan dan keinginan, tujuan serta aspirasinya sehingga mereka dapat mengambil keputusan untuk menentukan kesejahteraannya (Nikijuluw, 2002; Kartamihardja *et al.*, 2014).). Oleh karena itu

Analisis Data

Analisis data yang digunakan memakai analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*) yang merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang berdasarkan internal (dalam) dan eksternal (luar).

Faktor internal meliputi data primer dan sekunder. Data primer berupa kondisi secara umum pengelolaan lubuk larangan yang meliputi kondisi lingkungan di lubuk larangan yang diamati langsung. Sedangkan data sekunder merupakan

merupakan biaya yang dikeluarkan (outcome) dalam pengelolaan lubuk larangan serta biaya yang didapat (income) dari hasil panen ikan. Faktor eksternal meliputi data primer dan sekunder. Data primer berupa observasi langsung di lapangan terhadap potensi konversi perairan, daya dukung sebagai kawasan konservasi perairan, pengamatan persepsi dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan di lingkungan lubuk larangan. Sedangkan data sekunder meliputi inventarisasi kondisi, ekonomi dan budaya masyarakat di lingkungan lubuk larangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN Potensi perikanan di Dusun Rantau Pandan Kecamatan Rantau Pandan.

Kecamatan Rantau Pandan merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Dusun Rantau di Kabupaten Bungo, sungai Batang Bungo dimanfaatkan sejak tahun 2013, untuk kawasan konservasi dan reservat oleh masyarakat dibantu oleh pemerintah terkait. Kegiatan konservasi perikanan di sungai Batang Bungo sampai tahun 2020 berjumlah 33 lubuk dengan 1 kawasan reservat. Pengelolaan dilakukan oleh

Pandan di aliri oleh Sungai Batang Bungo dengan panjang \pm 50 km. Sungai Batang Bungo merupakan salah satu dari lima sungai terbesar masyarakat setempat bersama dengan pemangku adat dusun masing – masing, dengan tujuan untuk menjaga dan melestarikan sumberdaya ikan yang ada dari kepunahan. Selain kawasan konservasi lubuk larangan, di Dusun Rantau Pandan juga terdapat nelayan penangkapan ikan, pengolahan hasil perikanan dan perikanan budidaya.

Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian pada (Tabel 1) tingkat partisipasi masyarakat di kawasan lubuk larangan karak dusun Rantau Pandan sebanyak 80 responden didapatkan (18,71 %). Nilai ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap keberadaan lubuk larangan baik didalam struktur

organisasi, gotong royong, menjaga keberlanjutan perikanan tangkap dan pelestarian lingkungan perairan di kawasan lubuk larangan. Partisipasi diartikan sebagai upaya peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan (Raharjo, 1996).

Tabel 1 Tingkat Partisipasi Masyarakat di Empat Dusun terhadap Keberadaan Kawasan Konservasi Lubuk Larangan Karak di Dusun Rantau Pandan

Nilai Partisipasi Masyarakat	Kategori	Keterangan	Persentase (%)
1123	Rendah Sedang Tinggi	Tingkat partisipasi Rendah	18.71

Sumber : Data Olahan Data Primer 2020

Rendahnya tingkat partisipasi kawasan lubuk larangan karak dusun Rantau Pandan disebabkan sebagian besar masyarakat masih belum memahami istilah kawasan konservasi perikanan serta keikutsertaan masyarakat dalam program pemerintah. Daerah lain di Kabupaten Bungo di empat dusun yang berada di kawasan suaka perikanan (reservat) lubuk kasai tingkat partisipasi terhadap konservasi pada kategori sedang dengan nilai 3924 (41,30%) (Harizon *et al.*, 2020).

Tingkat partisipasi masyarakat faktor kelemahan seperti: partisipasi masyarakat dalam perencanaan, organisasi, berdiskusi juga rendah, keikutsertaan masyarakat dalam pelestarian lingkungan rendah, masih dijumpai eksploitasi sumberdaya perikanan yang berlebihan. Menurut Salm *et al.*, (2000) pengelolaan kawasan konservasi perlu diketahui persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap keberadaan fungsi tersebut, karena masyarakat yang memiliki persepsi yang benar akan berperilaku positif terhadap upaya-upaya konservasi. Keberhasilan dari pengelolaan konservasi juga tergantung dari dukungan masyarakat setempat. Dukungan masyarakat merupakan tanda bahwa masyarakat setempat peduli terhadap

konservasi, yang mendorong mereka untuk mentaati peraturan kawasan konservasi oleh masyarakat setempat dan pemerintah daerah.

Partisipasi yang baik adalah yang mendukung suksesnya suatu program. Beberapa sifat dari partisipasi antara lain positif, kreatif, kritis, korektif konstruktif dan realistis. Partisipasi dikatakan positif, bila partisipasi tersebut mendukung kelancaran usaha bersama dalam mencapai tujuan. Partisipasi kreatif, berarti keterlibatan yang berdaya cipta, tidak hanya melaksanakan instruksi atasan melainkan memikirkan sesuatu yang baru baik gagasan, metode maupun cara baru yang lebih efektif dan efisien. Partisipasi dapat dikatakan kritis, korektif-konstruktif bila keterlibatan dilakukan dengan mengkaji suatu jenis atau bentuk kegiatan, menunjukkan kekurangan bila ada dan memberikan alternative yang lebih baik. Partisipasi yang realistis mempunyai arti bahwa keikutsertaan seseorang dengan memperhitungkan realitas atau kenyataan, baik kenyataan dalam masyarakat maupun realitas mengenai kemampuannya, waktunya yang tersedia dan adanya kesempatan ketrampilan (Gultom, 1985).

Analisis Tingkat Partisipasi Pemangku Kepentingan

Berdasarkan hasil wawancara dan kuisioner dengan 13 pertanyaan dan 5 sub pertanyaan yang melibatkan 20 responden

hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemangku kepentingan juga pada kategori rendah. Dengan nilai 622 (31,1 %). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada (Tabel 2).

Tabel. 2. Hasil Rekapitulasi Tingkat Partisipasi Pemangku Kepentingan di Empat Dusun di Kawasan Konservasi lubuk larangan karak Dusun Rantau Pandan.

Nilai Partisipasi Masyarakat	Skor	Kategori	Keterangan	Persentase (%)
622		Rendah Sedang Tinggi	Tingkat partisipasi Rendah	31,1

Sumber : Olahan Data Primer, 2020

Dilihat dari (Tabel 2) diatas bahwa faktor tingkat partisipasi pemangku kepentingan masih lemah , hal itu disebabkan oleh rendahnya organisasi, berdiskusi/musyawaharah, melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk selalu melestarikan, memanfaatkan dan menjaga keberadaan kawasan konservasi perikanan dengan baik berbedanya tingkat sudut pandang dari pemangku kepentingan. Menurut Rahardjo (1996) partisipasi diartikan sebagai upaya peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan. Lebih

Analisis SWOT

Berdasarkan hasil matriks internal (Tabel 3) diketahui bahwa pengelolaan kawasan konservasi lubuk larangan di Dusun Rantau Pandan mempunyai total skor 0,374. Apabila dilihat dari skor ini, bahwa kondisi yang berasal dari dalam sistem masih mempunyai kekuatan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Partisipasi masyarakat diperlukan dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan,

lanjut dijelaskan partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam program-program pembangunan

Friedman dan Miles (2006) mengatakan setiap perbedaan kepentingan, kebutuhan, dan sudut pandang antar pemangku kepentingan, harus dikelola dengan baik agar tujuan dapat diwujudkan. Hermans dan Thiesen (2008) menyatakan bahwa setiap pemangku kepentingan memiliki kepentingan yang berbeda sehingga menyebabkan adanya kesenjangan informasi antar pemangku kepentingan.

pemanfaatan hasil dan tahap evaluasi, tidak hanya partisipasi yang bersifat pernyataan (Mardijono, 2008). Berdasarkan undang-undang dan kebijakan pemerintah, maka tujuan dasar partisipasi masyarakat di Indonesia adalah: 1) mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, 2) mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan negara, 3) membantu pemerintah untuk dapat mengambil kebijakan dan keputusan yang lebih baik dan cepat (Faizal, 2015).

Tabel 3. Matriks Internal Faktor Evaluation (IFE)

Faktor-faktor Strategis Internal	Bobot	Rating	Skor	
Kekuatan (S)				
S1	Sebagian besar masyarakat memahami istilah suaka perikanan.	0,033	2.1	0,069
S2	Tingginya Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan gotong royong dan penangkapan.	0,023	1.4	0,032
S3	Nilai Ekonomis Pendapatan terhadap keberadaan suaka perikanan	0.034	2.2	0,074
S4	Tingkat konflik terhadap keberadaan suaka perikanan rendah	0,020	1.3	0,026
S5	Keikutsertaan masyarakat dalam program pemerintah cukup baik	0,027	1.7	0,045
Kelemahan (W)				
W1	Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam organisasi perencanaan dan diskusi	0,026	1.6	0,041
W2	Eksplorasi hasil suaka perikan yang berlebihan	0,028	1.8	0,050
W3	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melestarikan suaka perikanan	0,032	2.0	0,064
Jumlah skor			0,374	

Sumber: Data olahan, 2020

Hasil pengamatan kondisi eksternal dari Kawasan Konservasi Perikanan di Dusun Rantau Pandan didapatkan beberapa

indikator, indikator tersebut disusun dalam *Matriks Eksternal Faktor Evaluation* antara lain:

Tabel 4. Matrik Eksternal

Faktor-faktor Strategis Eksternal	Bobot	Rating	Skor	
Peluang (O)				
O1	Lubuk Larangan sebagai tempat ekowisata perairan.	0,041	2.6	0,106
O2	Kerja sama antara pemerintah maupun pihak swasta	0,033	2.1	0,069
O3	Akses jalan menuju lokasi suaka perikanan	0,039	2.5	0,097
Ancaman (W)				
T1	Kurangnya publikasi dan sosialisasi terhadap keberadaan suaka perikanan	0,026	1.6	0,041
T2	Tidak adanya pelatihan tentang konservasi perairan kepada masyarakat	0,021	1.3	0,027

Sumber: Olahan Data Primer, 2020

Tabel 4 menunjukkan bahwa faktor yang memiliki skor peluang tertinggi yaitu Lubuk Larangan sebagai tempat ekowisata perairan dengan skor (0,106) dan skor terendah peluang pada Kerja sama antara pemerintah maupun pihak swasta dengan skor (0,069).

Faktor peluang dapat dimanfaatkan dengan manajemen pengelolaan yang baik, menurut Harizon *et al.*, (2020) meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) yang berkompeten, menyatukan pandangan untuk menata dan mengelola potensi kawasan suaka perikanan (reservat) sebagai potensi ekowisata, sehingga dapat menjadi sebuah kekuatan untuk mengembangkan kawasan suaka perikanan (reservat) sebagai ekowisata berbasis kearifan lokal. Masyarakat perlu menjalin komunikasi/kerjasama bersama pemerintah dusun maupun pemerintah daerah pemerintah serta semua pihak yang ikut serta dalam pengelolaan kawasan suaka perikanan (reservat).

Tabel 4 juga menunjukkan bahwa faktor yang memiliki skor ancaman tertinggi yaitu kurangnya publikasi dan sosialisasi terhadap keberadaan suaka perikanan

dengan skor (0,041) dan skor terendah ancaman pada kurangnya anggaran dana serta tidak adanya pelatihan tentang konservasi perairan kepada masyarakat dengan skor (0,027).

Ancaman terhadap kurangnya publikasi tentang keberadaan kawasan suaka perikanan (reservat) Lubuk Kasai yaitu belum banyak diketahui masyarakat luas, sehingga tidak menjadi populer dikalangan masyarakat. Masalah serius lainnya yang menjadi ancaman di kawasan suaka perikanan (reservat) yaitu degradasi lingkungan seperti pencemaran perairan akibat penambang emas tanpa izin (PETI) atau abrasi. Kurangnya anggaran dana juga menjadi ancaman serius karena reparasi terhadap kawasan perlu kebaruan dan penataan, sehingga membutuhkan pendanaan.

Menurut Sahide *et al.*, (2018) mengemukakan bahwa pengelolaan kawasan konservasi membutuhkan biaya yang besar dan seringkali pengelolaan kawasan konservasi menjadi terhambat di Indonesia disebabkan oleh tiadanya pendanaan berkelanjutan.

dikategori rendah dengan persentase (18,71%), untuk tingkat partisipasi pemangku kepentingan dikategorikan juga rendah dengan nilai partisipasi sebesar (31,1 %).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan kawasan konservasi

DAFTAR PUSTAKA

BPS [Badan Pusat Statistik] Kabupaten Bungo, (2011). Bungo dalam Angka, Muara Bungo. Provinsi Jambi.
Faizal, U. 2015. Partisipasi Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Banjir di Desa Plumpungan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Program Studi Geografi. Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Friedman A, Miles S. 2006. Stakeholder, Theory and Practice. Oxford (US): Oxford University Press. Muhammadiyah Purwokerto

- Gultom, R. M. S. (1985). *People's Participation in Development*. SWCU, Salatiga.
- Harizon, H., Hertati, R., & Kholis, M. N. (2020). *Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Suaka Perikanan (Reservat) Lubuk Kasai Perairan Batang Pelepat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi*. SEMAH Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Perairan, 4(1).
- Hermans LM, Thiessen WAH. 2008. Actor analysis methods and their use for public policy analysis. *European Journal of Operational Research*. 196: 808-818. doi:10.1016/j.ejor. 2008.03.040.
- Kartamihardja, E. S., Umar, C & Aisyah. (2014). *Pembelajaran dari pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Ikan Arwana Merah (Scleropages formosus, Muller and Schlegel, 1844) Bebas Masyarakat di Danau Empangau, Kalimantan Barat*. J.Kebijak.Perikan.Ind. 6 (2), 55 – 64.
- Mardijono. 2008. "Persepsi dan Partisipasi Nelayan terhadap Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Kota Batam". Tesis. Tidak Diterbitkan, Program Magister Manajemen Sumberdaya Pantai. Universitas Diponegoro. Semarang
- Nikijuluw, V. P. (2002). *Small-scale fisheries management in Indonesia. Interactive mechanisms for small-scale fisheries management*, 42.
- Oktaviani, D., Prianto, E., & Puspasari, R. (2016). *Penguatan kearifan lokal sebagai landasan pengelolaan perikanan perairan umum daratan di Sumatera*. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 8(1), 1-12.
- Raharjo, B. 1996. "Pemilihan Lokasi Budidaya Ikan Laut", Lampung: Balai Budidaya Laut Lampung
- Rangkuti F. 2008. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama. 184 hal.
- Sahide, M. A. K., Fisher, M. R., Maryudi, A., Dhiaulhaq, A., Wulandari, C., Kim, Y. S., & Giessen, L. (2018). *Deadlock opportunism in contesting conservation areas in Indonesia*. *Land use policy*, 77, 412-424.
- Salm, R. V., Salm, R. V., Clark, J. R., & Siirila, E. (2000). *Marine and coastal protected areas: a guide for planners and managers*. IUCN.